

## BAB II

### Konsep Demokrasi Dalam Tafsir Kontemporer

Bab ini memiliki tujuan ganda: pertama, untuk menyelidiki perkembangan pemikiran tafsir terkait konsep demokrasi, dan kedua, untuk merinci implikasi praktis dari pandangan ini dalam memandang pemerintahan Islam dalam era kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih mendalam mengenai interaksi antara konsep demokrasi dan penafsiran Al-Qur'an.

#### A. Sejarah Demokrasi

Sekitar 500 tahun sebelum Masehi, sejarah demokrasi tercatat ketika sekelompok kecil masyarakat di Yunani dan Roma mulai mengembangkan sistem pemerintahan.<sup>20</sup> Awal mula tumbuhnya demokrasi mengandung beberapa prinsip dan nilai yang diwarisi dari masa lalu yaitu gagasan budaya Yunani kuno dan demokrasi liberal, agama hasil reformasi dan kebebasan beragama, dampak perang agama.

Menerepkan demokrasi dalam kehidupan berbangsa pertama kali muncul pada negara Yunani kuno yaitu kota Athena (city-state/polis/civitas).<sup>21</sup> Demokrasi adalah tentang warga negara yang diberdayakan yang merupakan sebagian kecil dari total populasi. Kebanyakan budak, pedagang asing, perempuan dan anak-anak tidak diberikan hak demokratis.<sup>22</sup>

Masyarakat abad pertengahan menganut sistem feodal. Kehidupan politiknya diwarnai dengan merebutkan kekuasaan antar bangsawan satu lain. Kemajuan demokrasi di Abad Pertengahan menghasilkan sebuah dokumen penting – Carta Besar, Piagam Besar tahun 1215.<sup>23</sup>

Sistem demokrasi merupakan suatu sistem penguasaan kekuasaan pemerintahan sehingga tidak mudah disalah gunakan dalam penerapannya,

---

<sup>20</sup> Sistem administrasi adalah suatu struktur pemerintahan yang terdiri dari badan-badan yang mengendalikan kekuasaan dalam negara, yang melaksanakan hubungan fungsional antara badan-badan negara tersebut baik secara vertikal maupun horizontal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. (Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahadika, 2013, hal. 383.

<sup>21</sup> Nadrilun, *Mengenal Lebih Dekat Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), hlm. 6.

<sup>22</sup> Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi...*, *op.cit.*, hlm. 21

<sup>23</sup> Miriam Budiarjo, *op.cit.*, hlm. 54.

dan ciri utamanya<sup>24</sup> ialah pembagian dan pengurangan kekuasaan masing-masing pejabat sebagai pemimpin nasional. Pemisahan kekuasaan pemerintah. Di beberapa yurisdiksi, hal ini dilakukan agar pejabat yang berkuasa dapat bersifat permanen dan menghindari kekuasaan eksekutif atau kekuasaan untuk menjalankan kekuasaan, karena kekuasaan absolut adalah sistem kekuasaan pemerintahan yang memudahkan pejabat untuk menyalahgunakan jabatannya. Kami menentang korupsi, manipulasi, penipuan dan tirani, serta menahan diri untuk tidak merugikan komunitas atau masyarakat.<sup>25</sup>

Para pemikir kuno seperti Plato dan Polybius berpendapat bahwa demokrasi bukanlah pilihan terbaik bagi suatu sistem pemerintahan karena demokrasi yang “liar” akan melahirkan kehidupan anarkis yang nantinya akan melahirkan diktator<sup>26</sup> dan tiran.<sup>27</sup>

Perkembangan demokrasi Indonesia dapat dibagi menjadi empat periode: 1945-1959, 1959-1965, 1965-1998 dan setelah Orde Baru. Demokrasi tahun 1945-1959 dikenal dengan demokrasi parlementer dan sistem ini mulai berlaku satu bulan setelah proklamasi kemerdekaan.

Namun demokrasi tersebut dinilai kurang cocok untuk Indonesia. Lemahnya budaya demokrasi yang berlaku dalam model demokrasi Barat menawarkan peluang besar bagi partai politik untuk mendominasi dunia sosial dan politik. Kurangnya budaya demokrasi yang sesuai dengan sistem demokrasi parlementer menyebabkan perpecahan politik berdasarkan kasta dan agama. Oleh karena itu, pemerintahan yang berdasarkan aliansi politik sudah ketinggalan zaman.<sup>28</sup>

## B. Pengertian Demokrasi

---

<sup>24</sup> Sistem adalah suatu kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian, saling berhubungan, bagian-bagian atau sub-cabang dari sistem, yang menjadi induk dari rangkaian-rangkaian berikutnya. Inu Kencana Syafie dan Azhari, *Sistem Politik Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 4.

<sup>25</sup> P. Sharma, *Sistem Demokrasi yang hakiki*, Jakarta: Yayasan Menara Ilmu, 2004, hlm. 217.

<sup>26</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi berbagai Aspek Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 175.

<sup>27</sup> Tiran adalah bentuk negara yang mana pemerintahan oleh satu orang untuk kepentingannya sendiri. Ni'matul Huda, *Ilmu.. op.cit.*, hlm. 229.

<sup>28</sup> Lihat: Nurjanah.2013. <http://digilib.unila.ac.id/322/7/BAB%20II.pdf> unila.Hasil Penelitian. Diakses tanggal 22 November 2016

Pada dasarnya demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu *demos* yang berarti pemerintahan rakyat dan *cratein/cratos* artinya Government dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat atau seringkali pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.<sup>29</sup> Banyak definisi demokrasi yang dikemukakan oleh para ahli teori politik dari perspektif trinitas. Setiap orang mempunyai definisi yang berbeda-beda.

Amin Rais<sup>30</sup> mendefinisikan demokrasi sebagai sesuatu yang fundamental kehidupan bernegara secara umum memberi arti bahwa pada orang tingkat terakhir memberikan peraturan tentang hal-hal yang mendasar termasuk kehidupannya dalam mengevaluasi kebijakan pemerintah, karena kebijaksanaannya itu menentukan kehidupan manusia. Ini adalah demokrasi dipegang berdasarkan kemauan dan kekuasaan rakyat.

Menurut Joseph A. Schemeter, demokrasi merupakan suatu sistem pengambilan keputusan politik di mana individu mempunyai hak untuk memutuskan cara memilih dalam pemilihan umum<sup>31</sup> Menurut kamus, demokrasi merupakan pemerintahan rakyat yang kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dikendalikan langsung oleh rakyat atau wakil-wakilnya yang dipilih berdasarkan sistem pemilihan umum yang bebas.<sup>32</sup>

Demokrasi adalah suatu sistem di mana keputusan-keputusan umum diambil berdasarkan suara terbanyak yang secara efektif diamati oleh rakyat dalam pemilu dari waktu ke waktu berdasarkan prinsip kesetaraan politik dan dipertahankan hal yang menjamin kebebasan politik. Konsep demokrasi melibatkan pemerintahan di tangan individu, yang mencakup tiga komponen: pemerintahan oleh rakyat, pemerintahan melalui massa, dan pemerintahan melalui rakyat sendiri. kepada orang-orang yang bertanggung jawab.

### C. Sistem Demokrasi

---

<sup>29</sup> Pangeran Astomo 2014. *Teori dan Praktek Konstitusi*. Thafa Media, Yogyakarta. hlm. 46.

<sup>30</sup> Amin Rais, *Pengantar Dalam Demokrasi dan Proses Politik*, LP3ES, Jakarta, 1986 hlm. 5.

<sup>31</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 168

<sup>32</sup> Diane Ravitch, *Apa itu Demokrasi?* terjemahan oleh Budi Pyaritno, Amerika: United States Information Agency, 1991, hlm. 4.

Pemberlakuan sistem demokrasi bagi bangsa Indonesia terangkum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia yang berkedaulatan rakyat” dalam suatu “ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Yaitu dengan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Sistem demokrasi di Indonesia terbagi menjadi lima (5) periode.

#### 1. Demokrasi di era revolusi nasional (1945-1949)

Pada awal zaman kemerdekaan, Indonesia menganut sistem parlementer<sup>33</sup> dengan kehadiran banyak partai. Sebagai ciri dari sistem multi partai, ideologi sistem multi partai yang begitu kuat antara tahun 1945-1949 mampu menekan sistem politik otoriter yang berperan dominan dalam penyelenggaraan negara. Terbukti partai politik mampu melengserkan Kabinet yaitu Kabinet Syahrir I, II, III dan Kabinet Syarifuddin menggantikan Kabinet Syahrir II. Kondisi ini berlangsung hingga tahun 1947.<sup>34</sup>

#### 2. Demokrasi di era liberal (1950-1959)

Pada periode ini model pelaksanaan demokrasi belum dapat dilaksanakan, karena belum terbentuknya lembaga-lembaga demokrasi secara jelas dalam bidang administrasi dan sosial, kehidupan politik pada periode ini bercirikan demokrasi liberal. Pada saat yang sama, lembaga eksekutif berada pada posisi yang “*kurang kuat*” dibandingkan partai politik, sehingga pemerintahan terus mengalami jatuh bangun, dan situasi politik tidak stabil.<sup>35</sup> Ada 6 (enam) karakteristik dari model demokrasi liberal, yaitu:<sup>36</sup>

- a. Terdapat sistem dan mekanisme kompetisi di bidang politik yang berintikan kompetisi di antara partai politik yang ada.

---

<sup>33</sup> Dimana Presiden tidak lagi menjadi kepala pemerintahan melainkan hanya sebagai kepala Negara. Benny Bambang Irawan, *Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia*, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol.5 No.1 Oktober 2007, hlm. 59.

<sup>34</sup> Benny Bambang Irawan, *loc.cit.*

<sup>35</sup> Lodewijk Gultom, *Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Bandung: CV. Utomo, 2007, hlm. 115.

<sup>36</sup> Zamroni, *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultur*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013, hlm. 71.

- b. Terdapat kebebasan individu dalam berbagai aspek kehidupan, dengan segala cara dan hak-hak untuk mengekspresikannya.
- c. Terdapat sistem dan mekanisme peralihan kekuasaan yang jelas serta terbuka dan senantiasa didasarkan pada konstitusi yang ada.
- d. Terdapat pengakuan adanya batas antara masyarakat sipil dan kekuasaan negara.
- e. Terdapat jaminan atas hak-hak yang dijamin oleh undang-undang untuk melakukan oposisi atas kebijakan pemerintah.
- f. Sistem dan mekanisme kerja negara, pemerintah dan partai politik berdasarkan konstitusi.

Kelemahan-kelemahan Demokrasi liberal<sup>37</sup> yaitu:

- a) Konsep dan definisi liberal lebih memiliki kekuatan formalitas, tetapi tidak dalam level operasional.
- b) Model demokrasi liberal memberikan jaminan adanya kebebasan sipil atau adanya hak-hak milik pribadi, itu benar.
- c) Mengandung prinsip politik etnis, dalam kerangka kebebasan dan partisipasi.
- d) Adanya pembatasan partisipasi masyarakat
- e) Sangat anti dan bersifat tidak toleran akan adanya perubahan yang bersifat revolusioner.
- f) Dalih menegakkan demokrasi, termasuk di negara lain, tidak segan-segan melakukan pemaksaan dengan bayonet, tank dan bom.
- g) Karakteristik pluralisme dalam model demokrasi liberal, hanya sekedar mitos belaka.

### 3. Demokrasi di era terpimpin (1959-1965)

Sistem multi partai yang berlaku dalam penerapan demokrasi liberal mendominasi perkembangan politik selama sepuluh tahun dan berakhir dengan munculnya demokrasi terkelola.<sup>38</sup> Ketika Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit pada tanggal 5 Juli 1959, hal tersebut kemudian dipertimbangkan, cara untuk mengelola demokrasi. Dalam Demokrasi Terpimpin, kekuasaan terpusat di tangan Presiden, yakni Soekarno.

---

<sup>37</sup> Zamroni, *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultur*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013. hlm. 73-75.

<sup>38</sup> Slamet Muljana, *op.cit.*, hlm. 64.

Ketua DPR, MPR, BPK, MA diangkat sebagai pembantunya dengan jabatan sebagai Menteri.

#### 4. Demokrasi di era orde baru (1966-1998)

Ketika pemerintahan Orde Baru memasuki kancah politik nasional, negara Indonesia menghadapi krisis politik dan ekonomi yang luar biasa. Di bidang politik, krisis ini ditandai dengan berbagai demonstrasi mahasiswa, mahasiswa, dan ormas partai politik yang hidup dalam tekanan di era demokrasi terkelola.

Dalam perjalanan sejarah, Soekarno tetap menjadi Presiden sampai munculnya Orde Baru atau runtuhnya Demokrasi Terpimpin, yang dibangun Soekarno sendiri. Begitu pula ketika bentuk negara Indonesia berubah dari republik berdasarkan UUD RIS Tahun 1949 menjadi negara federal (persatuan) dan negara kesatuan berdasarkan UUD Sementara tahun 1950, Soekarno dan Moh. Hatta juga tetap menjadi presiden dan wakil presiden.<sup>39</sup>

Konfigurasi politik Orde Baru sampai dengan Pasca Pemilu 1997 adalah tidak demokratis atau cenderung otoriter dengan tumpuan kekuatan pada Presiden Soeharto, ABRI, Golkar dan Birokrasi. Masa Orde Baru (1966-1998) menunjukkan struktur politik yang tidak demokratis. Perlu dicatat bahwa di awal perjalanan ini terdapat toleransi terhadap munculnya majelis demokratis. Namun, pemerintahan menjadi sangat otoriter dan menindas, sehingga pemerintahan tidak berfungsi secara demokratis.<sup>40</sup>

#### Perbedaan Otoriterisme Orde Lama dan Orde Baru

Orde Lama	Orde Baru
Tidak ada Sistem Kepartaian	Melahirkan Sistem Kepartaian

<sup>39</sup> Luky Sandra Amalia, Syamsudin Haris, dkk, *Evaluasi Pemilihan Presiden Langsung di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, hlm. 29.

<sup>40</sup> Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri*, (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007), hlm. 42.

Tumpuan Kekuatan adalah Soekarno sebagai Presiden	Tumpuan Kekuatan adalah Presiden Soeharto, ABRI, Golkar dan Birokrasi
Jalan yang ditempuh dengan cara inkonstitusional	Melalui cara konstitusional
Obsesi utama adalah pemusatan kekuasaan dengan alasan, paling tidak menurut yang dikemukakan secara terbuka, untuk mencegah disintegrasi	Memiliki obsesi membangun stabilitas nasional sebagai prasyarat kelancaran pembangunan ekonomi

Pada masa orde lama yang awalnya menunjukkan keperkasaan politik Soekarno, tampak terjadi polarisasi politik yang sangat tajam dan penuh kekerasan yang meledak pada tahun 1965/1966. dalam krisis politik tahun ini. Di sisi lain, unsur disintegrasi dihilangkan pada masa Orde Baru, sehingga stabilitas nasional tetap stabil dan pembangunan ekonomi menunjukkan hasil yang memuaskan, namun dengan kehidupan politik yang tidak demokratis.

#### 5. Masa Reformasi Demokrasi (1999-2009)

Pemilu parlemen tahun 1999 yang dipersiapkan dalam waktu singkat, dilaksanakan relatif bebas, adil dan adil, dibandingkan pemilu Orde Baru sebelumnya. Namun pemilu tahun 1999 hanyalah langkah awal menuju terbentuknya tatanan politik yang demokratis, menuju berkembangnya tatanan politik yang dapat menjamin penghormatan terhadap hak-hak politik rakyat sebagai cerminan prinsip kedaulatan rakyat.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara... op.cit.*, hlm. 276

Garis hitam tebal yang memisahkan masa kelam Orde Baru dengan era reformasi adalah kembalinya kedaulatan kepada rakyat pada 21 Mei 1999, setelah lebih dari tiga dekade kekuasaan neo-fasis Soeharto dari Orde Baru.

Ada 3 (tiga) pihak yang mengancam proses pembangunan demokrasi, yaitu militerisme, kerajaan bisnis konglomerat hitam dan serangan kelompok Soehartois.<sup>42</sup>

Sistem demokrasi membutuhkan warga negara yang memiliki karakter dan semangat demokratis.

- a. Karena setiap individu mempunyai kemampuan untuk memahami perbedaan, berhak menjadi dirinya sendiri dan mendapat pengakuan atas kesetaraan yaitu tidak ada yang lebih baik dari yang lain;
- b. Anda memiliki keinginan dan kemampuan untuk berkomunikasi lintas perbedaan;
- c. Memiliki kemampuan memecahkan konflik sosial secara damai dan memiliki kerangka untuk memecahkan konflik, senang berkomunikasi dan mengambil keputusan secara demokratis; dan
- d. Memiliki kesadaran hukum, memiliki tanggung jawab sebagai warga negara dan memiliki keterampilan yang diperlukan, serta berfikir kritis dan analitis untuk bisa menyampaikan gagasan dan menanggapi gagasan pihak lain secara rasional dan santun.

#### **D. Konsep-konsep Demokrasi**

Demokrasi, meski secara epistemologis lahir di Barat, merupakan sistem yang mengandung nilai-nilai inti yang mudah beradaptasi dan dapat diterapkan di negara-negara berbagai latar belakang yang berbeda. Prinsip dasar demokrasi adalah: partisipasi rakyat, kesetaraan, adaptasi minoritas, tanggung jawab, transparansi, pemilu yang bebas dan adil, kebebasan ekonomi, kontrol dan pemisahan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia,

---

<sup>42</sup> Tamrin Amal Tomagois, *Republik Kapling*, (Yogyakarta: Resisi Book, 2006), hlm. 204

sistem multi partai sebagai representasi ganda rakyat, lembaga negara yang tidak memihak dan taat hukum.<sup>43</sup>

Oleh karena itu, menurut Denny JA, demokrasi harus disesuaikan dengan tempat di mana ia dipraktikkan karena demokrasi hanya akan kuat jika dipadukan dengan budaya lokal yang dominan. Denny JA mengutip Marcus Garvey yang mengatakan bahwa membangun suatu sistem menjadi suatu bangsa tetapi tidak menggunakan unsur-unsur terbaik dari budaya dominan bangsa itu seperti mencoba melestarikan pohon yang tidak berakar.<sup>44</sup>

Agar dapat memahami pola penyesuaian karakteristik demokrasi di berbagai negara maka setidaknya akan dibahas mengenai penerapan demokrasi di tiga negara dengan latar belakang ideologi yang berbeda-beda. Yang pertama adalah Amerika dengan liberalismenya, Cina dan komunismenya, dan Indonesia dengan Pancasila.

#### 1. Demokrasi Liberal di Amerika

Amerika adalah negara yang terdepan dalam mengampanyekan demokrasi.<sup>45</sup> Demokrasi memiliki latar belakang sejarah di negara ini melalui peristiwa Revolusi Amerika pada tahun 1765-1783. Amerika baru mulai mengadopsi nilai-nilai demokrasi pada abad ke-18. Budaya demokrasi ini mulanya dianut oleh para elit pendiri Amerika sehingga kemudian merembes dalam kehidupan masyarakatnya.<sup>46</sup>

Liberalisme muncul setelah hilangnya identitas dan otoritas agama absolut di Barat serta untuk melawan kesewenang-wenangan monarki. Liberalisme juga merupakan respons terhadap pluralisme dramatis yang tercermin dalam perselisihan antar agama selama masa Reformasi. Di Amerika, sejarah liberalisme lebih panjang dibandingkan sejarah demokrasi. Demokrasi muncul sebagai fenomena pada pertengahan

<sup>43</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara...* hlm. 85.

<sup>44</sup> Denny Januar Ali, *ct al.*, *Mewacanakan Kembali Demokrasi Pancasila yang Diperbaharui...* hlm. 21.

<sup>45</sup> Dadang Supardan menyebut bahwa hegemoni Amerika menyebarluaskan demokrasi diantaranya adalah untuk kepentingan internal Amerika sendiri. Namun kadang cara yang digunakan justru tidak demokratis, sebagai contoh invasi Amerika atas Irak yang dilakukan dengan alasan meruntuhkan represi Saddam Hussein, invasi terus berlanjut meski ditentang oleh masyarakat Amerika dan dunia internasional. Dadang Supardan, "Sejarah dan Prospek Demokrasi," dalam *SOSIO DIDAKTIKA*, Vol. 2 No. 2, 2015, hal. 134. Muhammad Nasir Badu, "Demokrasi dan Amerika Serikat", dalam *The POLITICS*, Vol. 1 No. 1, Januari 2015, hlm. 11-12.

<sup>46</sup> Muhammad Nasir Badu, "Demokrasi dan Amerika Serikat" ... hlm. 12-13.

abad ke-19, sedangkan liberalisme sudah ada sejak abad ke-17 dan ke-18. Bahkan para pendiri Amerika Serikat adalah kaum liberal pertama dan terpenting sebelum menjadi Demokrat.<sup>47</sup>

Persoalan utama teori politik liberal adalah bagaimana menyelaraskan pemahaman tentang negara sebagai struktur kekuasaan yang spesifik dan sah yang harus dibatasi sesuai dengan hak, tugas dan tanggung jawab subyeknya. Di sini otoritas negara dan individu harus dibentuk agar yang lain tidak saling menyakiti. Oleh karena itu, demokrasi liberal menghadapi dilema dalam menemukan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab individu.<sup>48</sup>

Selain itu, juga termasuk imbas dari liberalisme demokrasi di Amerika adalah separasi dan limitasi peran agama dalam negara yang lebih dikenal sebagai sekulerisme, yaitu pemisahan agama dari hal-hal keduniaan. Konstitusi Amerika menerangkan bahwa pemerintah tidak boleh mengeluarkan peraturan menyangkut agama tertentu meski di lain sisi juga harus melindungi hak kebebasan beragama individu warga negara.

## 2. Demokrasi Sosialis di Tiongkok

Penerapan demokrasi yang berjalan di negara Cina atau Tiongkok. Berbeda dengan Amerika yang berdemokrasi liberal. Sedangkan Tiongkok dikenal sebagai negara yang berideologi Komunis-Leninisme, karena pada dasarnya memiliki kecenderungan otoriter dalam pemerintahannya. Salah satu wujudnya adalah terjadinya tindakan represif pemerintah atas demonstrasi mahasiswa di Tiananmen tahun 1989 yang menelan banyak korban jiwa. Karena sebab itu, Tiongkok harus terkucilkan dari dunia internasional.<sup>49</sup>

Kejadian ini menyebabkan maraknya gerakan-gerakan demokratisasi di Tiongkok, seperti lembaga *Human Rights In China* (HRIC), *the China Support Network* (CSN), dan *the Independent Federation of Chinese Students and Scholars* (IFCSS). Dalam kurun selanjutnya muncul Partai Kebebasan dan Demokrasi Cina (PFDC)

---

<sup>47</sup> John McGowan, *American Liberalism: An Interpretation for Our Time*, Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2007, hlm. 12.

<sup>48</sup> David Held, *Models of Democracy...* hlm. 65.

<sup>49</sup> Adrian Leftwich, *et al.*, *Democracy and Development: Theory and Practice*, Cambridge: Polity Press, 1996, hlm. 209.

pada tahun 1991 dan Partai Demokrasi Cina (CDP) pada tahun 1998. Meski begitu, nuansa kuat partai tunggal oleh Partai Komunis Tiongkok (CCP) masih sangat mendominasi.<sup>50</sup>

Konsep demokrasi yang dijalankan oleh Tiongkok adalah demokrasi sosialis, dimana kedaulatan rakyat diaplikasikan dalam wujud Kongres Rakyat Nasional (NPC) sebagai lembaga legislatif yang terdiri dari partai berhaluan komunis ataupun demokratis. Akan tetapi kongres ini lebih bernuansa konsultatif daripada partisipatif-kompetitif, dimana partai-partai nonkomunis tidak mendebat pihak komunis dalam hal kebijakan di muka umum. Mereka hanya memberikan masukan-masukan dalam batasan nasehat yang jauh dari kesan sebagai oposisi pemerintah.<sup>51</sup>

Schumpeter mengatakan, praktik demokrasi sosialis yang diterapkan Tiongkok merupakan demokrasi non-substantif, dimana prosedur demokrasi diabaikan dan hanya bertujuan semata-mata, ia tidak memungkiri kemungkinan adanya kesesuaian antara demokrasi dan sosialisme, meski sosialisme kemudian didamaikan dengan prosedur demokrasi.<sup>52</sup>

Menurut Roch. Eddy Prabowo, Demokrasi Sosialis bernuansa komunal dimana kebebasan individu dibatasi oleh masyarakat.<sup>53</sup> Demokrasi Sosialis Tiongkok dipengaruhi oleh filsafat moral Konfusianisme yang telah mengakar kuat dalam masyarakatnya.

Istilah sistem demokrasi ada bermacam-macam, yaitu demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin<sup>54</sup>,

<sup>50</sup> John Patrick Kusumi, "a Brief History of the Chinese Democracy Movement in Exile," dalam <http://www.freecchina.net/2006/comment/00008.htm>, diakses 22 September 2020.

<sup>51</sup> Elin Yunita Kristianti, "Menarik! Demokrasi ala China yang Komunis dan Iran 'Konservatif'," dalam <https://www.liputan6.com/global/read/740380/menarik-demokrasi-ala-china-yang-komunis-dan-iran-konservatif>, diakses 22 September 2020. Hasil wawancara terhadap tokoh demokratis Tiongkok: BBC News Indonesia, Cina Demokratis? dalam [https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2010/03/100305\\_chinapolitician](https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2010/03/100305_chinapolitician), diakses 22 September 2020.

<sup>52</sup> Joseph Alois Schumpeter, *Capitalism, Socialism, and Democracy...* hlm. 236-237.

<sup>53</sup> Roch. Eddy Prabowo, "Demokrasi Pancasila Sebagai Model Demokrasi yang Rasional dan Spesifik," dalam *Jurnal CIVIS*, Vol. 1 No. 1, 2011, hlm. 45-46.

<sup>54</sup> Sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, gaya hidup politik Indonesia yang otoriter berkedok demokrasi terkelola. Demokrasi terpimpin berkaitan

demokrasi pancasila, demokrasi kerakyatan<sup>55</sup>, demokrasi soviet, demokrasi nasional, dan sebagainya.<sup>56</sup> Semua istilah tersebut menggunakan istilah demokrasi yang dalam asal katanya berarti “pemerintahan”. dari rakyat” atau “pemerintahan atau dipimpin oleh rakyat”.

Di antara sekian banyak aliran demokrasi, ada dua jenis: aliran demokrasi yang sah dan aliran demokrasi yang berdasarkan komunisme tetapi berpura-pura demokratis. Demokrasi konstitusional membayangkan suatu pemerintahan dengan kekuasaan terbatas dan berdasarkan prinsip "*rightstaat*", yang pada dasarnya adalah supremasi atau supremasi hukum. Sebaliknya negara demokrasi yang menganut paham komunisme membayangkan suatu negara yang kekuasaannya (*machtstaat*) tidak dapat dibatasi dan bersifat mutlak.<sup>57</sup>

### 3. Demokrasi Konstitusional

Konsep demokrasi konstitusional mengatakan bahwa pemerintahan demokratis memiliki kekuasaan terbatas dan tidak dapat mengganggu kebahagiaan rakyatnya. Ini menunjukkan bahwa kelompok budaya perlu dilindungi dan bahwa para pemimpin dari kelompok budaya yang paling signifikan dalam masyarakat harus bekerja sama.<sup>58</sup>

### 4. Demokrasi Komunisme

Menurut pendekatan kelompok demokrasi yang berideologi komunis, mereka selalu mempunyai sikap *ambivalen* terhadap pemerintah. Ia memandang negara sebagai instrumen perjuangan yang akhirnya hilang dengan munculnya masyarakat komunis.<sup>59</sup>

Dari segi implementasinya, ada dua model demokrasi. Yaitu:

---

dengan proses pengambilan keputusan melalui konsensus dan semangat gotong royong. Mahfud MD, Politik dan Hukum... *op.cit.*, halaman 136.

<sup>55</sup>Demokrasi rakyat adalah bentuk demokrasi khusus yang menjalankan fungsi kediktatoran proletariat. Misi negara transisi adalah untuk menjamin pembangunan negara menuju sosialisme. Bentuk khusus ini tumbuh dan berkembang di negara-negara Eropa Timur seperti Cekoslowakia, Polandia, Hongaria, Rumania, Bulgaria dan Yugoslavia, serta Tiongkok. Ni'matul Huda, Ilmu... *op.cit.*, hal. 204.

<sup>56</sup> Miriam Budiarto, *op.cit.*, hlm. 50.

<sup>57</sup> Ni'matul Huda, Ilmu... *op.cit.*, hlm. 201.

<sup>58</sup> Efriza, *Ilmu Politik: Dari Ilmu Politik sampai Sistem Pemerintahan*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 114.

<sup>59</sup> Ni'matul Huda, Ilmu... *op.cit.*, hlm. 201-202.

1. Demokrasi langsung adalah jenis demokrasi di mana populasi benar-benar menyadari bahwa mereka adalah bagian dari pemerintahan. Misalnya, pemilihan parlemen digunakan untuk memilih anggota Majelis Nasional atau DPR, serta pejabat eksekutif seperti presiden, wakil presiden, gubernur, gubernur, dan wali kota.
2. Demokrasi tidak langsung atau perwakilan, juga dikenal sebagai demokrasi tidak langsung, adalah jenis demokrasi yang terjadi apabila masyarakat memiliki kekuasaan melalui sistem perwakilan daripada secara langsung.<sup>60</sup>

Dan demokrasi terbagi menjadi dua kategori—demokrasi parlementer dan presidensial—berdasarkan bagaimana kedaulatan berinteraksi dengan lembaga negara.

- 1) Demokrasi sistem parlementer adalah jenis demokrasi di mana legislatif berada di atas lembaga eksekutif. Presiden menjabat sebagai kepala pemerintahan, dan menteri dan perdana menteri diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Presiden mewakili peran kepala negara.
- 2) Demokrasi presidensial adalah demokrasi yang kekuasaan eksekutifnya ditentukan oleh demokrasi kerakyatan dan pemilihan langsung oleh rakyat. Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan pemerintahan.

Hal ini menandakan bahwa sebetulnya semua faktor yang ada dalam pengertian demokrasi ini sudah menanamkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang sudah penulis sebutkan sebelumnya seperti adanya sistem perwakilan, kemudian adanya keterbukaan dalam berpendapat dan menerima pendapat serta dilakukan secara terbuka dan dalam awasan masyarakat yang memang dalam Al-Qur'an pun dijelaskan bahwa musyawarah sendiri dilaksanakan dalam pengawalan pemimpin yang juga melibatkan kaum muslim dalam pengambilan keputusannya.

## 5. Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, ideologi negara Indonesia. Pancasila terdiri

---

<sup>60</sup> Yessyca Yunitasari, Sugiyanto dan Kayan Swastika, *Abdurrahman Wahid's Thought about Democracy in 1974-2001*, Jurnal Historica ISSN No. 2252-4673 Vol.I (2017) Issue-I, hlm. 85.

dari lima prinsip utama: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Untuk memahami latar belakang demokrasi Pancasila dalam Al-Quran, kita bisa mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Quran.

1) Ketuhanan Yang Maha Esa:

Al-Quran menekankan pentingnya keesaan Allah (Tauhid). Surah Al-Ikhlâs (112:1-4) adalah salah satu contoh ayat yang menekankan keesaan Tuhan.

"Katakanlah: Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia."

2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab:

Al-Quran menekankan pentingnya keadilan dan kemanusiaan. Surah Al-Ma'idah (5:8) menyatakan, "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa."

Surah Al-Hujurat (49:13) juga menekankan persaudaraan dan kesetaraan antar manusia: "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti."

3) Persatuan Indonesia:

Al-Quran mengajarkan pentingnya persatuan dan kerukunan. Surah Al-Hujurat (49:10) menyatakan, "Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat."

4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan:

Al-Quran menganjurkan permusyawaratan dalam menyelesaikan urusan. Surah Asy-Syura (42:38) menyatakan, "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan

musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka."

Surah Ali 'Imran (3:159) juga menyatakan, "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu."

5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia:

Al-Quran menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan sosial. Surah An-Nisa (4:58) menyatakan, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Surah Al-Hasyr (59:7) menekankan distribusi kekayaan untuk mencegah penumpukan harta pada kelompok tertentu: "supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu".

## E. Tujuan Demokrasi

Secara teoritis, kebebasan berpikir dan kedaulatan adalah pilar demokrasi dalam kehidupan nasional, dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur yang menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Demokrasi memiliki banyak tujuan, termasuk menjamin kebebasan berpikir dan berekspresi, mencegah konflik antar kelompok, menjamin keamanan dan keharmonisan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, dan mengurangi kekuasaan pemerintah.

Demokrasi menonjol menurut tugas dan hubungan aparatur negara, artinya: Demokrasi yang menganut sistem parlementer, Dalam demokrasi ini terdapat hubungan yang erat antara badan legislatif dan eksekutif, dengan Perdana Menteri menjadi satu-satunya yang mendukung Perdana Menteri, yang disebut dengan "kabinet". Hukum Partai ini mempunyai mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat atau Kongres.

Demokrasi yang memiliki pemisahan kekuasaan berarti bahwa kekuasaan dibagi menjadi bagian legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konsep demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila, yang memiliki karakteristik yang terkait dengan ideologi negara Pancasila, yaitu musyawarah dan mufakat.

Pertimbangan berasal dari sila keempat Pancasila, yang merupakan nilai tertinggi yang ada di Indonesia.

Demokrasi Indonesia lebih mengutamakan proses konsensus, hal ini terlihat pada proses pengambilan keputusan dari desa hingga pusat, Indonesia lebih mengutamakan proses konsensus, bukan mayoritas. Diskusi ini melibatkan langsung masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

## F. Prinsip Demokrasi

Teori demokrasi: untuk memahami konsep pemerintahan demokratis diperlukan prinsip-prinsip yang dapat menjadi titik tolak penilaian sistem politik pemerintahan demokratis. Secara garis besar, prinsip demokrasi mempunyai empat pilar utama, yaitu:<sup>61</sup>

- a) Lembaga legislatif atau parlemen yang mewakili rakyat.
- b) Lembaga eksekutif sebagai penyelenggara pemerintahan.
- c) Lembaga yudikatif yaitu memberikan keputusan hukum dan keadilan dalam pelaksanaan undang-undang.
- d) Persamaan sebagai cara mengelola masyarakat.

Sedangkan untuk mengembangkan sistem politik demokratis sebagai standar evaluasi, tiga prinsip dasar berikut harus diikuti:<sup>62</sup>

1. Memperkuat etika, persatuan, dan moralitas dalam kegiatan politik pemerintahan sebagai landasan sistem politik, ekonomi, dan sosial penyelenggaraan pemerintahan.
2. Menerapkan prinsip-prinsip konstitusi secara aktif dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dan mengikuti keabsahan undang-undang terkait.
3. Penerapan akuntabilitas publik mengharuskan mereka yang memegang atau memegang jabatan pemerintahan harus bertanggung jawab kepada rakyat.

## G. Model-model demokrasi

Untuk menambah wawasan tentang demokrasinya, Indonesia digambarkan sebagai negara yang telah mengalami tiga puluh tahun

---

<sup>61</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 293.

<sup>62</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen Uud 1945*, Ed. 1, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2010), Hlm. 67.

pemerintahan, yaitu pemerintahan orde lama, pemerintahan orde baru, dan pemerintahan reformasi. Negara ini juga telah mengalami empat fase perkembangan demokrasi, yaitu:<sup>63</sup>

- 1) Permulaan Republik Indonesia, yang merupakan periode demokrasi konstisional yang menekankan peran partai politik, dikenal sebagai demokrasi parlementer.
- 2) Periode Republik Indonesia II adalah periode demokrasi yang tidak stabil dan dipimpin yang dalam beberapa hal menyimpang dari demokrasi konstitusional yang dasar dan menampilkan berbagai elemen demokrasi kerakyatan.
- 3) Negara Republik Indonesia Era ketiga, juga dikenal sebagai Demokrasi Pancasila, adalah jenis demokrasi konstitusional dengan sistem presidensial dan pelaksanaan UUD 1945, GBHN, dan Pancasila yang bersih dan konsisten. Ini juga dikenal sebagai Demokrasi Orde Baru.
- 4) Partai Republik Indonesia. Era Keempat Indonesia, yaitu demokrasi yang diubah, di mana hak rakyat untuk menentukan nasib mereka dikembalikan.

Tidak diragukan lagi, banyak variabel yang memengaruhi bagaimana model demokrasi bervariasi di berbagai negara. Namun, baru-baru ini, perspektif yang berbeda tentang demokrasi muncul sebagai hasil dari fakta ini.

Demokrasi dianggap mencakup segalanya. Demokrasi memerlukan pembentukan institusi internal, seperti partai politik, lembaga pemerintah, dan masyarakat sipil, sehingga demokrasi harus berkaitan dengan representasi kehendak rakyat.

Penelitian cendekiawan Muslim Abu Nashr Muhammad Ibn Muhammad Ibn Tarkhan Ibn al-Uzalagh, atau yang lebih dikenal dengan nama Farabi, tentang konsep "kebebasan" dalam konteks masyarakat sejalan dengan pendapat Hans Kelsen. Karena manusia adalah makhluk sosial, menurut Farabi, hidup manusia tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Kecenderungan seperti ini alami. Kebutuhan hidup bermasyarakat tidak

---

<sup>63</sup> Umar kayam, *proses demokrasi dan budaya Indonesia* (Jakarta: pt. temprin It, 1994), hlm. 145.

hanya sekedar memahami kebutuhan dasar saja, namun mewujudkan seluruh kehidupan sebagai manusia, tidak hanya lahiriah namun juga rohani.<sup>64</sup>

Demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan yang digunakan bertahun-tahun atau bahkan selamanya, berubah menjadi sebuah budaya. Tidak seperti konotasi makna budaya seni atau yang lain, namun demokrasi berkembang menjadi sebuah budaya dikarenakan penggunaannya yang berlangsung sangat lama dan berkesinambungan untuk terus melakukan pembenahan dan perbaikan terkait fungsinya sebagai sebuah bentuk pemerintah.

Salah satu definisi demokrasi adalah sistem "pemerintahan oleh rakyat". Historisnya menunjukkan bahwa istilah ini pertama kali digunakan sekitar abad ke-5 SM. Demokrasi, atau versi lengkapnya, memiliki karakteristik berikut: otoriter, dua partai politik atau lebih, pemilu rutin, pemerintahan yang transparan, dan pengawasan sosial yang baik. oleh komunitas.<sup>65</sup>

#### H. Pandangan Ulama Muslim Tentang Demokrasi

Jika meninjau mengenai permasalahan demokrasi dalam Al-Qur'an, pandangan pemikiran Islam terhadap demokrasi pun kiranya perlu dibahas untuk mengetahui sejauh mana demokrasi bisa berkembang dalam Islam dengan kontekstualisasi dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menyinggung elemen-elemen yang nilainya digunakan pada konsep dan perkembangan demokrasi.

Tiga kelompok besar orang berdebat tentang demokrasi dan Islam. Pertama dan terpenting, hubungan antara Islam dan demokrasi adalah unik karena keduanya merupakan sistem politik yang berbeda. Islam dianggap sebagai sistem politik yang berbeda dengan demokrasi. Oleh karena itu, karena demokrasi dan Islam berbeda, demokrasi sebagai ide Barat tidak boleh digunakan sebagai referensi dalam kehidupan sosial..

Islam dianggap sebagai agama yang kaffa, atau mencakup segalanya, yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, termasuk keimanan dan ibadah. Akibatnya, Islam dianggap sebagai sistem politik alternatif untuk demokrasi. Para ulama seperti Sayyid Qutb, Syekh Fadhallah Nuri,

---

<sup>64</sup> Hm. Thalbah, *Tcori Demokrasi Dalam Wacana Kctatancgaraan*, hlm. 404.

<sup>65</sup> Miriam budiardjo, *Dasar-dasar ilmu politik* (Jakarta: pt Gramedia, 1982), hlm. 50

Thabathabai, al-Sya'rawi, Ali Benhadj, dan Syekh Muhammad Mutawali al-Sha'rawi mendukung perspektif ini.<sup>66</sup>

Seorang ulama Iran bernama Syaikh Fadillah Nuri. Menurutnya, prinsip demokrasi hanya mempunyai satu tujuan: kesetaraan bagi seluruh warga negara. Namun, karena banyak perbedaan, hal ini tidak mungkin dilakukan dalam Islam. Misalnya, ada perbedaan antara orang yang beragama Islam dan orang yang beragama kafir; juga ada perbedaan antara ahli hukum Islam dan mereka yang menganut hukum Islam. Tidak ada seorang pun di dunia Islam yang boleh memerintah berdasarkan hukum. Karena tugas manusia adalah memenuhi hukum Tuhan.<sup>67</sup>

Setelah itu, Sayyid Qutb sangat menentang gagasan demokrasi. Karena demokrasi merupakan ide tentang kedaulatan Dia menganggap ini melanggar otoritas Tuhan. Pra-Islam, menyalahkan kekuasaan Tuhan adalah kebodohan. Ia menyatakan bahwa bangunan pemerintahan Islam harus didasarkan pada negosiasi. Karena Islam adalah sistem moral dan hukum.<sup>68</sup>

*Kedua*, kelompok yang toleran terhadap perbedaan meskipun menerima demokrasi. Kelompok pertama mengakui adanya gerakan demokrasi Islam, tetapi juga mengakui bahwa demokrasi berbeda dengan Islam apabila demokrasi didefinisikan dengan cara yang dipraktikkan di negara-negara Barat. Kelompok kedua mengakui bahwa demokrasi adalah konsep yang sejalan dengan Islam setelah penyusuaian definisi.<sup>69</sup>

Tokoh-tokoh dari kelompok yang mendukung teori kedua ini termasuk Al-Maududi, Imam Khumani, Rasyid al-Ghanaoushi, Abdul Fatah Morou, dan Taufiq Asy-Syawi, serta beberapa tokoh Indonesia seperti Moh Natsir dan Jalaludin Rahmat. Menurutnya, prinsip demokrasi dan prinsip Islam serupa. Misalnya keadilan, kesetaraan, tujuan nasional dan musyawarah. Bedanya, di negara demokrasi yang menganut tradisi Barat, rakyat mendapatkan kedaulatan, namun dalam Islam karena hukum yang ditetapkan Tuhan.<sup>70</sup>

---

<sup>66</sup> Komarudin Hidayat Dan Azyumardi Azra, *Demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat madani*, hlm. 159

<sup>67</sup> John L. Esposito, *Islam Dan Politik*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), Hlm 118.

<sup>68</sup> John L. Esposito, *Islam Dan Politik*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), Hlm 120.

<sup>69</sup> Komarudin Hidayat Dan Azyumardi Azra, *Demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat madani*, hlm. 159

<sup>70</sup> Sukron Kamil, *Islam Dan Demokrasi: Telaah Konsptual Dan Historis* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), Hlm. 49.

Dalam hal demokrasi, Imam Khumaini berpendapat bahwa demokrasi Islam tidak sama dengan demokrasi Barat. Hukum harus membatasi semua kebebasan, dan Konstitusi dan hukum Islam harus menjadi batasnya. Iran memiliki konstitusi yang didasarkan pada hukum agama, tetapi negara itu adalah demokrasi.<sup>71</sup>

*Ketiga*, mereka adalah kelompok masyarakat yang sangat mendukung demokrasi. Islam menurut mereka sangat demokratis. karena Islam sepenuhnya mendukung demokrasi. Dia menyatakan bahwa nilai-nilai demokrasi sudah ada dalam Islam, berkat prinsip musyawarah syura dan konsep ijtihad dan ijma. seperti yang ditanyakan oleh R. William Liddle dan Saeful Mujani, dua pakar ilmu politik. Muhammad Husein Heikal, seorang pemikir Islam asal Mesir, adalah salah satu orang yang sangat menganut ide demokrasi. Dia berpendapat bahwa demokrasi dimulai dengan Islam. Hukum Islam adalah hukum negara demokrasi. Demokrasi dan Islam berpusat pada kemanusiaan. Selain itu, Nurcholis Madjid, Amin Rais, Munawir Syadzali, Ahmad Syafi'I Ma'arif, dan Abdurrahman Wahid adalah tokoh-tokoh Indonesia yang mendukung teori tersebut.

Bahtiar Effendy, di sisi lain, menekankan bahwa kurangnya pengalaman demokrasi di sebagian besar negara Islam tidak ada hubungannya dengan aspek praktik nilai-nilai dalam ajaran Islam. Menurut Effendy, secara teologis, kegagalan banyak negara Islam untuk mengembangkan proses politik demokratis disebabkan oleh pandangan hukum dan formalitas hubungan Islam dan politik. Oleh karena itu, ajaran Islam harus dipertimbangkan dengan hati-hati dan mendalam untuk mendorong keputusan hukum yang sesuai dengan demokrasi dan Islam. Apalagi saat mempelajari tafsir Al-Quran dan menafsirkan nilai-nilai demokrasi saat ini.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Sukron Kamil, *Islam Dan Demokrasi*, hlm. 50.

<sup>72</sup> Masjid, *Hukum dan Keadilan*, hlm. 57.